

POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PERKEMBANGAN ISLAM DI TURKI

A. Kebijakan Luar Negeri AS

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terdiri dari empat macam pola. Pola-pola tersebut satu sama lain saling berbeda bahkan ada juga yang bertentangan. Hal ini terjadi karena satu sama lain secara periode berada pada tahap interval waktu yang cukup panjang. Dalam, keilmuan, sejarah perkembangan konsep-konsep dan teori-teori hubungan internasional dapat hilang rena termakan oleh paradigma baru atau dengan kata lain persepsi terhadap persoalan dalam hubungan internasional sering mengalami anomali.

Pola pertama, adalah Isolasionis, merupakan sikap yang dimunculkan oleh para pengambil keputusan politik luar negeri Amerika Serikat. Mulai berlaku pada masa awal penerapan politik luar negeri yang selanjutnya menjadi kebijaksanaan. Alasan dasar dari kebijaksanaan ini adalah adanya politik imperialisme Eropa yang merasa besar (*great power*) terhadap negaranegara lemah di luar Eropa sendiri.

Sifat isolasionis Amerika Serikat dikembangkan lebih lanjut oleh James Monroe pada tahun 1823, dengan

alasan mengusir persyarikatan besar. Akhirnya Amerika Serikat tampil dalam bentuk intervensi di Amerika. Tapi tujuannya untuk menolong Amerika Serikat dari ancaman, karena posisi Amerika Serikat pada saat itu sebagai pembela Amerika. Tindakan ini sekaligus mengumumkan Doktrin Monroe yang akhirnya menjadi termashur pada saat itu dengan semboyan '*American for the American*'.¹⁾

Periode ekspansi, pola ini sangat bertolak belakang dengan pola pertama, isolasionis. Awal mula terjadinya pergeseran ini karena Amerika Serikat secara lambat laun juga mengikuti arus perkembangan dari Barat yang dibawa oleh orang-orang Eropa. Amerika Serikat mencoba mengembangkannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kondisi dalam negerinya, yakni berkeinginan menguasai seluruh benua Amerika. Keinginan tersebut terbukti dengan adanya perang AS-Meksiko.²⁾

Periode selanjutnya adalah netral. Timbulnya perang besar dalam sejarah abad ke-20 telah memberi warna baru dalam konstelasi perpolitikan di Amerika Serikat, terutama politik luar negerinya. Peperangan yang terjadi

¹⁾ Soebantardjo, *Sari Sejarah Eropa Amerika Jilid II*, BOPKRI, Yogyakarta, 1961, hal. 139

²⁾ Dexter Perkin, *The American Approach to Foreign Policy*, Terjemahan Aditiaman, Jakarta, 1956, hal.13

pada waktu yang mengkhawatirkan seluruh dunia, tidak mempengaruhi Amerika Serikat agar melibatkan diri dalam peperangan. Dalam rangka mengantisipasi, Amerika Serikat mengambil tindakan kebijaksanaan, yakni sikap netral yang dimanifestasikan dalam berbagai kebijaksanaan.

Pada perkembangan selanjutnya politik luar negeri Amerika Serikat mengarah pada intervensi, yaitu kebijakan yang bersifat campur tangan dalam berbagai urusan, baik masalah internasional, masalah regional, ataupun masalah dalam negeri. Politik ini mengakibatkan peran Amerika Serikat semakin besar pada periode setelah PD II, bahkan pada saat sekarang ini. Politik intervensi ini dilakukan Amerika Serikat secara terang-terangan tanpa mengindahkan norma-norma dalam negerinya, negara lain, dan peradilan yang berlaku dalam hubungan internasional.

Politik intervensi bagi Amerika Serikat dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dalam bentuk nyata. Setiap tindakan yang dilakukin harus bermanfaat bagi kepentingan nasionalnya sendiri. Amerika Serikat sering menggunakan jalan pintas dalam mengambil kebijakan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Jalan pintas ini biasanya tidak menggunakan prosedural peradilan dalam



sistem pemerintahan Amerika Serikat dan internasional. Dalam hal ini PBB merupakan salah satu wahana yang dijadikan legitimasi oleh Amerika Serikat untuk melakukan apa saja yang sesuai dengan kepentingannya. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat sering dibicarakan dalam lingkup ketegangan dialektik antara dua pola yang berlawanan: pragmatisme-realisme dan legalisme-moralisme. Atau dengan kata lain, kebijakan luar negeri Amerika mondar-mandir antara politik riil dan moralisme. Esensi realisme ini adalah kepentingan nasional yang terkait erat dengan keamanan nasional.³⁾ Sebaliknya, legalisme-moralisme menunjukkan sebuah etos budaya yang lebih dalam beserta nilainya. Nilai-nilai ini tertanam dalam gagasan inti dari 'kebesaran bangsa, berdampingan dengan perjuangan kebebasan individu dan kapitalisme demokratis di dalam dan luar negeri. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini. Amerika Serikat mempunyai kepentingan global untuk

³⁾ 3) Glen H. Hastedt, Ed., *American Foreign Policy : Past, Present, Future*, Englewoods Cliffs NJ : Prentice-Hall, 1997, hal.28-34

menguasai Timur Tengah baik secara ekonomis, politis, maupun strategis, dan ini tidak ingin kepentingannya tersebut gagal. Dengan pengaruh yang cukup besar Amerika Serikat melalui Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi, mulai dari kecaman, pengerahan pasukan multi-nasional, blokade ekonomi, sampai persetujuan penggunaan militer, yang mana semua resolusi tersebut bertujuan untuk menyelamatkan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah.

Dalam menjaga kelangsungan kepentingannya di Timur Tengah, Amerika Serikat berkeinginan untuk menata kembali stabilitas politik dan keamanan di kawasan tersebut. Salah satunya adalah penyelesaian konflik Arab-Israel karena konflik ini adalah merupakan kunci pokok bagi perdamaian dan stabilitas keamanan Timur Tengah. Kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Timur Tengah tidak terlepas dari kepentingan minyaknya. Pada mulanya alasan keamanan dan strategis masih mendasari ambisi Amerika Serikat untuk terlibat di Timur Tengah, namun setelah 30 tahun kemudian, pentingnya Timur Tengah menjadi faktor bagi Amerika Serikat yang sudah menjadi salah satu

importir minyak terbesar di dunia.⁴⁾

Semakin pentingnya Timur Tengah dengan semakin tergantungnya negara-negara sekutu Amerika Serikat (Eropa Barat dan Jepang) terhadap minyak Timur Tengah, yakni sekitar 80 persen dari kebutuhan minyak mereka. Pentingnya minyak bagi negara-negara di luar kawasan, telah menyebabkan negara-negara industri tersebut memusatkan perhatiannya untuk mendapatkan konsesi dari negara-negara Timur Tengah. Oleh karenanya stabilitas Timur Tengah menjadi penting bagi Amerika Serikat dan sekutunya untuk menjamin kelancaran lalu lintas suplai minyak dari kawasan tersebut. Dari gejolak-gejolak yang dapat mengancam kelangsungan kepentingan mereka, dan cara terbaik untuk menghindari ancaman tersebut yaitu penyelesaian bagi terwujudnya perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Banyak pengaruh yang telah ditimbulkan dari konflik tersebut, mulai dari embargo minyak yang dilakukan negara-negara Arab terhadap negara-negara Barat yang mendukung Israel yang menyebabkan kelumpuhan industri negara-negara maju sampai keterlibatan Amerika

⁴⁾ *Analisis CSIS, Tahun XVIII No.5 September-Oktober 1989, hal.44*



dengan Islam; seperti komunis, kebangkitan Islam bukan hanya sebuah gerakan dakwah (*proselytising*) tapi juga gerakan untuk mengubah (*revisionist*). Orang Amerika menganggap kebangkitan Islam ini sebagai sebuah kekuatan yang *atavistic* dan militan yang didorong oleh kebencian terhadap pemikiran-pemikiran politik Barat, mengajak kembali ke medan permusuhan sepanjang zaman melawan Kristen.

Ketakutan serta kekhawatiran Amerika Serikat terhadap ancaman Islam, sebagian besar dikarenakan ledakan politik Islam yang menghambur masuk dalam percaturan politik. Peristiwa-peristiwa regional, seperti perang Arab-Israel tahun 1973 akibat dari embargo minyak Arab, Revolusi Iran tahun 1978-1979 yang diikuti krisis penyanderaan, mengejutkan banyak pejabat Amerika sehingga mereka memandang Islam sebagai ancaman bagi kepentingan Barat. Karena perhitungan keamanan, serta pertimbangan-pertimbangan politis dan ekonomis yang menjadi dasar buruknya pandangan Amerika terhadap Islam.

1. Islam dan Demokrasi

Setelah keruntuhan Uni Soviet (komunisme), Islam



Serikat dan Uni Soviet dalam rangka memperebutkan pengaruh pada kawasan yang strategis dan kaya minyak itu. Namun dengan berakhirnya Perang Dingin yang disertai dengan bubarnya Uni Soviet, maka Amerika Serikat tidak bersemangat lagi menjalankan politik pembendungannya terhadap Uni Soviet di Timur Tengah. Untuk sementara Amerika Serikat merasa kepentingan vitalnya sudah terjamin di Timur Tengah serta tidak ada lagi saingan bagi Amerika Serikat di kawasan itu.

B. Sikap Amerika Serikat Terhadap Islam

Islam dalam pandangan orang Amerika pada umumnya adalah sebuah budaya yang bermusuhan dan merupakan ancaman bagi kepentingan dan nilai-nilai budaya mereka. Pandangan rakyat Amerika ini mungkin saja berakar dari sejarah religius negeri ini, dan bisa ditelusuri sampai ke konflik historis antara umat Kristen dan Islam-sebuah pertikaian yang diturunkan dan dipopulerkan dari generasi ke generasi melalui sejarah, sastra, media, dan wacana akademis.

Alexander dalam "Amerika Serikat Dalam Dunia Islam Fundamental", *VELFA*, 28 Februari 1992, Amerika Serikat mensejajarkan ancaman komunis



telah menjadi ancaman baru bagi Amerika Serikat (Barat). Yang menjadi pertanyaan, mengapa Amerika Serikat memandang Islam sebagai ancaman? Apakah karena Islam bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi?

Memang, Islam dengan gerakan Islam luas diberitakan sebagai 'anti demokrasi'.⁵⁾ Pandangan ini didasarkan pada dua alasan.⁶⁾ Pertama, masalah konflik kekuasaan. Dewasa ini, negara-negara Islam di Timur Tengah umumnya dikuasai elite politik sekuler, tetapi mereka mendapat tantangan yang semakin meningkat dari gerakan Islam. Dalam beberapa kasus, gerakan Islam berhasil mengambil alih kekuasaan (di Iran misalnya), atau berbagi kekuasaan dengan elite sekuler. Bisa dimengerti jika dalam pertarungan kekuasaan, elite sekuler takut pada gerakan Islam.

Alasan kedua, adalah konflik peradaban. Dewasa ini, baik dari segi kultur, politik, maupun ekonomi, Barat mendominasi dunia. Sedangkan peradaban lain dipandang sebagai 'marginal'. Kebangkitan Islam dipandang sebagai ancaman terhadap kemapanan budaya Barat, terutama sesudah

⁵⁾ Alan Elsner, Dalam "Amerika Serikat Bahas Istilah Islam Fundamentalisme", *PELITA*, 28 Februari 1992.

⁶⁾ *Kahyan International*, 23 Januari 1992



runtuhnya komunisme.

Dua Islamolog Barat, John L. Esposito dan James P. Piscatori menyatakan bahwa Islam pada kenyataannya memberikan kemungkinan kepada bermacam interpretasi; Islam bisa digunakan untuk mendukung demokrasi maupun kediktatoran; republikanisme maupun monarki.⁸⁾ Menurut mereka, reaksi negatif umat Islam terhadap demokrasi Barat seringkali merupakan bagian dari penolakan umum terhadap pengaruh kolonial Eropa, sebuah 'benteng' Islam terhadap ketergantungan yang lebih jauh kepada Barat, ketimbang suatu penolakan umum pada demokrasi.

Dalam hal hubungan Islam dan demokrasi, menurut Esposito dan Piscatori, terdapat tiga aliran pemikiran⁹⁾; Pertama, aliran pemikiran yang hanya karena prinsip *shura* (musyawarah), tetapi juga berpendapat, Islam di dalam dirinya demokratis tidak karena konsep-konsep *ijtihad* (independent reasoning) dan *ijma* (konsensus/ permufakatan).

Kedua, aliran pemikiran yang menolak gagasan Islam

⁸⁾ John L. Esposito dan James P. Piscatori, *Democracy and Islam, The Middle East Journal*, Vol. 45 No. 3, Summer 1991.

⁹⁾ *Ibid*

dan demokrasi. Aliran ini muncul pada tahun 1905-1911 di Iran selama berlangsungnya Gerakan Konstitusional. Syakh Fadlallah Nuri, selama debat tentang formulasi konstitusi mengemukakan, satu kunci gagasan demokrasi, semua persamaan warga negara, adalah "impossible" dalam Islam.

Ketiga, aliran yang menurut John L. Esposito dan James P. Piscatori; ***"Like the first school of thought, this line of argument holds that Islam constitutes its own form of democracy, but, like the second, concentrates of the relationships between divine and popular sovereignty"***.

Dengan kata lain, aliran ketiga ini menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam, tetapi di lain pihak mengakui adanya perbedaan di antara keduanya.

Menurut Amos Perlmutter, watak sejati Islam bukan hanya menolak demokrasi tapi sepenuhnya membenci dan memusuhi seluruh budaya politik demokratis. Islam merupakan sebuah gerakan revolusioner yang agresif, sama militan dan kejamnya dengan gerakan Bolshevik, Fasis, dan Nazi di masa lalu. Islam tidak bisa didamaikan dengan



Barat yang Kristen dan sekuler, dan karenanya, Amerika Serikat harus memastikan gerakan ini dilumpuhkan sejak lahir.¹⁰⁾

2. Islam dan Politik

Dalam Islam, muncul topik hubungan antara politik dan agama berawal dari pertanyaan tentang kaitan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW., dengan politik, kaitan Islam sebagai agama dengan sistem kenegaraan, dan bentuk aturan sistem pemerintahan dalam Islam itu sendiri. Sejak pasca Nabi Muhammad SAW., sampai abad modern, umat Islam menampilkan sistem dan bentuk pemerintahan yang beragam, baik dalam bentuk kekhalifahan, monarki-absolut, republik yang sekuler dan agamis. Sedangkan dalam konsep pemikiran, topik hubungan antara Islam dan politik muncul paling tidak dalam tiga kelompok pemikiran arus besar. Kelompok pertama menyatakan bahwa di dalam Islam terdapat ajaran tentang sistem politik dan pemerintahan, karena Islam adalah agama yang paripurna. Kelompok kedua mengatakan di dalam Islam tidak ada sistem politik dan

¹⁰⁾ Amos Perlmutter, *Wishful Thinking About Islamic Fundamentalism*, Washington Post, 19 Januari 1992

pemerintahan, tetapi Islam mengandung ajaran-ajaran dasar tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan kelompok ketiga berpendapat, Islam sama sekali tidak terkait dengan politik dan pemerintahan. Menurut mereka Islam hanya mengandung ajaran tentang tauhid dan pembinaan akhlak dan moral manusia. Terjadinya keragaman praktek dan keragaman konsep pemikiran tersebut, tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran Islam tetapi juga oleh situasi dan kondisi tuntutan zaman, latar belakang budaya, tingkat perkembangan peradaban dan intelektual serta pengaruh peradaban pemikiran asing. Dengan demikian terdapat proses tarik menarik antara ketentuan-ketentuan normatif dalam ajaran Islam dengan kenyataan sosial politik dan historis.



Tarik menarik antara keduanya juga terjadi dalam upaya menampilkan sistem dan bentuk pemerintahan. Kelompok Muslim yang sepaham dengan kelompok pertama akan mengaktualisasikan Islam dalam bentuk Islam politik. Dan kelompok Muslim yang sepaham dengan kelompok pemikiran kedua akan menampilkan Islam dalam bentuk gerakan kultural dan intelektual.

Menurut Dr. V. Fitzgerald¹¹⁾, Islam bukanlah semata agama (*a religion*), namun jug'a merupakan sebuah sistem politik (*a political system*). Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sedangkan Dr. Schacht¹²⁾ berpendapat bahwa, Islam lebih dari sekedar agama: ia juga mencerminkan teoriteori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih

¹¹⁾ *Muhammedan Law, ch. I, hal. 1*

¹²⁾ *Encyclopedia of Social Sciences, Vol. VIII, hal. 333*

sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara keseluruhan.

Ada tiga hal yang mendasari posisi Amerika Serikat terhadap Islam Politik. Pertama, Amerika Serikat tidak ingin terlihat tak bersahabat bagi negara-negara Islam; ini dikhawatirkan bakal memperparah sikap mereka terhadap Amerika. Alasan kedua, Amerika Serikat ragu-ragu untuk secara terbuka mendukung kelompok Islam manapun kecuali jika menguntungkan bagi kepentingan regionalnya ataupun kepentingan sekutunya.. Alasan ketiga: di dalam lingkaran para pembuat kebijakan luar negeri negara Amerika Serikat terdapat sebetulnya ketidakyakinan tentang kemungkinan terjadinya hubungan baik antara Islam dan demokrasi.

C. Kebangkitan Islam Di Turki

Istilah kebangkitan Islam baru muncul dalam beberapa dekade akhir abad ke-20, yang sering diungkap dengan kebangkitan Islam (*resurgence of Islam*), penegasan kembali (*reassertion*) atau kebangkitan kembali (*revivalism*), pembaharuan, neo-fundamentalisme.

⁽³⁾ Fazlul Abdullah, Sharon Siddique (ed.), *Tradisi Aliran Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta, 1983, hal. 7-8

⁽⁴⁾ Ziauddin Sardar, *Masa Depan Islam*, (Terjemahan), Pustaka Pelajar, Bandung, 1987, hal. 36

ataupun kebangunan kembali.¹³⁾ Secara umum, kebangkitan kembali Islam dapat dipandang sebagai suatu pencarian akan kemantapan dan kehidupan kembali warisan masa lampau Islam yang diilhami oleh penghinaan terhadap nilai-nilai Barat, nasionalisme sekuler, materialisme sosialis, dan konsumerisme Barat yang telah menimbulkan masalahmasalah ekonomi dan social di banyak negeri muslim.¹⁴⁾

Kebangkitan Islam ini, dalam makna yang paling dalam dan paling luas, merupakan fase akhir dari hubungan Islam dengan Barat; sebuah upaya untuk menemukan jalan keluar yang tidak lagi melalui ideologi-ideologi Barat, tapi di dalam Islam. Ia merupakan perwujudan dari penerimaan terhadap modernitas dan penolakan terhadap kebudayaan Barat.

Begitu juga dengan apa yang terjadi di Turki, keinginan masyarakatnya untuk kembali pada kejayaan dan nilai-nilai Islam didorong oleh rasa kekecewaan mereka terhadap nilai-nilai Barat tersebut, terutama nilainilai yang terdapat di dalam westernisasi dan sekulerisasi.

¹³⁾ Taufiq Abdullah, Sharon Siddique (ed.), *Tradisi Akan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta, 1988, hal. 7-8

¹⁴⁾ Ziaudin Sardar, *Masa Depan Islam*, (Terjemahan), Pustaka Pelajar, Bandung, 1987, hal. 46



Sistem sekuler yang dipertahankan itu hanya menguntungkan segelintir golongan yaitu, para birokrat dan elite

1. Partai Refah

pemerintahan.

Ada beberapa partai yang memperjuangkan Pemihakan masyarakat Muslim di Turki kepada partai kepancingan Islam sebelum pada akhirnya berdirilah Partai Refah mengisyaratkan kesadaran mereka bahwa Islam adalah Refah yang memperjuangkan nilai-nilai Islam pada tanggal alternatif penyelesaian semua resesi yang sedang dihadapi 4 Maret 1983. Refah yang artinya kesejahteraan berdirilah manusia modern dan dengan Islam sajalah martabat dan cita untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua rakyat derajat umat terangkat di hadapan umat lain. Citra para pemimpin Refah sendiri yang terkenal bersih, jujur dan kini belum teresentir kebangkitan identitas. Basispartai dapat memegang amanah serta yang jelas tidak korup adalah Refah yang fanatik ada di sekitar kuburan Sultan Mehmed, penyebab lainnya yang akhirnya rakyat memberikan di samping masjid Partih (monumen pembebasan kota Istanbul) kepercayaan terhadap partai tersebut.

Bentuk istilah Islam yang dihidupkan kembali merujuk pada adanya kenyataan bahwa kaum Kemalis dalam fanatik di dalam negeri. Partai Refah juga mempunyai mengendalikan Turki sama sekali tidak bisa hubungan yang amat erat dengan Islam atau pemerintahan mengesampingkan potensi Islam sebagai kekuatan ideologi Turki yang kini mengembara di seluruh dunia, terutama di Eropa. Kelompok Islam Turki yang berada di Eropa ada dalam kendali kaum Kemalis, tetapi Islam yang sudah mempunyai gerakan yang disebut "Milli Garus". Kelompok menjadi sangat populis merupakan faktor yang harus selalu ini menjadi pendukung utama Partai Refah di Turki yang diperhitungkan. Kenyataan ini menimbulkan rangsangan untuk mengkaji perkembangan Turki sebagai negara sekuler pertama di dunia Islam yang mempunyai banyak pengalaman



dalam melakukan modernisasi.

2. Kemenangan Partai Refah

1. Partai Refah

Partai Refah dikenal sebagai pemenang dalam pemilihan umum Desember 1995 dengan meraih 158 dari keseluruhan 550 kursi di Parlemen. Partai Refah yang memperjuangkan nilai-nilai Islam pada tanggal 4 Maret 1983. Refah yang artinya kesejahteraan bercita-cita untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua rakyat (Motherland Party) yang dipimpin oleh Tansu Ciller, Partai Jalan Kebenaran (True Path Party) yang dipimpin oleh Mesut Yilmaz dan Partai Demokratik (Democratic Party) pimpinan Bülent Ecevit. Refah yang fanatik ada di sekitar kuburan Sultan Mehmed, di samping mesjid Fatih (monumen pembebasan kota Istanbul dari tangan Byzantium pada tahun 1453).¹⁵⁾

Namun, selain mempunyai basis yang kuat dan fanatik di dalam negeri, Partai Refah juga mempunyai hubungan yang amat erat dengan imigran atau perantauan Turki yang kini mengembara di seluruh dunia, terutama di Eropa. Kelompok imigran Turki yang berada di Eropa mempunyai gerakan yang disebut "*Milli Gurus*". Kelompok ini menjadi pendukung utama Partai Refah di Turki yang

¹⁵⁾ *Suara Hidayatullah*, 04/X/Rabiul Akhir, 1418, hal.46

¹⁶⁾ *Suara Merdeka*, 27 Agustus 1996

¹⁷⁾ *Rakyat / Berita Hürriyet* - 123325 *hürriyet* (Akses tanggal 19 Agustus 2001)

menjadi induknya.

2. Kemenangan Partai Refah

Partai Refah keluar sebagai pemenang dalam pemilihan umum Desember 1995 dengan merebut 158 dari keseluruhan 550 kursi di parlemen.¹⁶⁾ Partai Refah berhasil mengalahkan Partai Jalan Kebenaran (*True Path Party*) yang dimotori oleh Tansu' Ciller, Partai Tanah Air (*Motherland Party*) yang dipimpin oleh Mesut Yilmaz dan Partai Demokratik (*Democratic Party*) pimpinan Bulent Ecevit.

Tabel Hasil Pemilihan Umum 24 Desember 1995.¹⁷⁾

Nama Partai	Kursi Parlemen	Dalam Persen
Partai Refah (RP)	158	21.24 %
Partai Tanah Air (AnaP)	135	19,65 %
Partai Jalan Kebenaran(DYP)	132	19,20 %
Partai Demokratik Kiri(DSP)	76	14,60 %
Partai Rakyat Republik(CHP)	49	10,74 %
Total	550	

Kemenangan Partai Refah ini sangat mengejutkan

¹⁶⁾ *Suara Merdeka*, 27 Agustus 1996

¹⁷⁾ <http://www.iirrkish/e122595.htm> (Akses tanggal 19 Agustus 2001)

sekutu Barat Turki terutama Amerika Serikat dimana pemimpin partai politik Islam yang sering menekankan tema-tema anti Barat mengungguli lawan-lawan sekulernya yang didukung penuh oleh masyarakat Barat. Kekhawatiran Amerika Serikat dan elit sekuler Turki terhadap kemunculan Partai Refah dapat dipahami. Sejak tahun 1970-an Erbakan secara konsisten menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai Islam dan menolak penerapan negara sekuler yang ketat ala Kemalis yang melarang warga negaranya sendiri mengekspresikan warisan budayanya.

Langkah pertama yang dilakukan Erbakan setelah berkuasa adalah melakukan lawatan ke negara-negara Islam, khususnya Iran dan Libya, dua negara yang dituduh oleh Amerika Serikat sebagai sponsor terorisme internasional. Ia juga membangun kerjasama militer dengan Iran bahkan menyepakati kerjasama ekonomi skala besar.

Di dalam negeri, Februari 1996, Partai Refah meloloskan undang-undang pembolehan pemakaian jilbab di perkantoran, dan merencanakan pembangunan mesjid di lapangan Takzim yang berada di tengah kota Istambul yang telah lama menjadi simbol sekulerisme Turki. Dengan semua ini, tampaknya Erbakan ingin mengembalikan identitas

Samudra, 11 Juli 1997

